

ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007-2011

Zulkifly Prabowo Damanhuri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Jl. MT. Haryono 165 Malang

Zulkifly13@gmail.com

Abstract: *This research had the purpose to identify and analyze the financial performance of local government in the City of East Java fiscal year 2007-2011. The samples in this research were all city government within the territory of the province of East Java which amounted to only 9 cities. Data were analyzed used Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah, and Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Result of this research based on Rasio Kemandirian Keuangan Daerah still shown the pattern of instructive relationships, based on Rasio Efektivitas Keuangan Daerah financial management in East Java city government can be said to be effective, based on Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah seen an increase in the growth of almost all the city, based on Rasio Efisiensi Keuangan Daerah shows that the city government in East Java has a tendency inefficient.*

Keywords: *financial performance, the city government, East Java, Rasio Keuangan Daerah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota di Jawa Timur tahun anggaran 2007-2011. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang hanya berjumlah 9 kota. Data analisis menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungan kemandirian daerah masih menunjukkan pola hubungan instruktif, berdasarkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota di Jawa Timur dapat dikatakan efektif, berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terlihat peningkatan pertumbuhan dari hampir semua kota yang ada, berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur memiliki kecenderungan Efisien Berimbang.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pemerintah Kota, Jawa Timur, Rasio Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat kota untuk menyelenggarakan semua urusan

pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas dana yang dipercayakan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan

di atas, maka dirasa perlu untuk meneliti mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan otonomi di masing-masing daerah tersebut dengan menggunakan alat analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Tujuan yang akan dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota di Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2007-2011) dengan analisis rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan efisiensi PAD

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah yang merupakan suatu cara pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha keuangan daerah. Tata usaha keuangan daerah dibagi menjadi dua golongan, yaitu tata usaha umum dan tata

usaha keuangan (Halim, 2007:27). Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat-menyurat, agenda, ekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau pengarsipan serta kegiatan dokumentasi lainnya. Tata usaha keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Tata usaha keuangan ini sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah yang merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten, atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan yang berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Berikut disajikan lingkungan akuntansi keuangan daerah pada Gambar 1.



Sumber : Akuntansi Keuangan Daerah (Halim, 2007:38)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Asas umum yang harus dilakukan sebagai dasar penyusunan APBD antara lain :

- a) APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b) Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- c) APBD mempunyai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

- d) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
- f) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain (Ihyaul Ulum,2005:276) :

- a) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan cara berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

- b) Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

- c) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran nonfinansial.

Halim (2007:232) menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD :

- a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana

ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2002:129-130). Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

c) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan

meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode

METODE PENELITIAN

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Menurut Sugiyono (2012:81), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian anggota populasi dalam penelitian yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah perwakilan populasi. Pemerintah Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur hanya berjumlah 9 Kota yaitu Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Batu, oleh karena itu seluruh anggota populasi

dijadikan sampel. Dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik Sampling Jenuh atau Sensus.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Menghitung Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan pinjaman}}$$

- 2) Menghitung Rasio Efektivitas Keuangan

Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$$

- 3) Menghitung Rasio Pertumbuhan

Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}}$$

- 4) Menghitung Rasio Efisiensi Keuangan

Daerah

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Biaya pengumpulan PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

HASIL ANALISIS

Propinsi Jawa Timur berada di antara propinsi Jawa Tengah dan propinsi Bali. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Hindia. Propinsi Jawa Timur terletak diantara 111° - 114,02° BT dan 7,12° - 8,48°

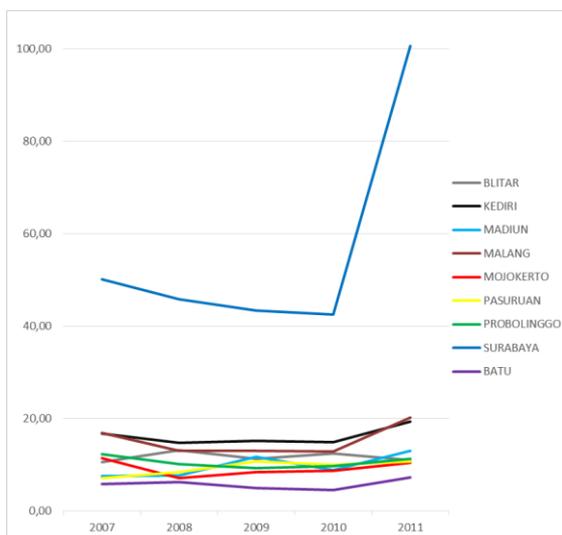
LS. Luas wilayah Jawa Timur 147.130,15 km² terbagi atas kawasan hutan 12.261,64 km² (26,02%) persawahan seluas 11.286,71 km² (26,07%), pertanian tanah kering mencapai 11.449,15 km² (24,29%), pemukiman/kampung seluas 5.712,15 km² (12,12%), perkebunan seluas 1.581,94 km² (3,36), tanah tandus/rusak seluas 1.293,78 km² (2,75%), tambak/kolam mencapai 737,71 km² (1,57%), kebun campuran seluas 605,65 km² (1,29%) selebihnya terdiri dari rawa/danau, padang rumput, dan lain-lain seluas 1.201,42 km² (2,55%).

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diketahui bahwa Kota Blitar selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif dan. Kota Kediri selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif dan. Kota Madiun selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Kota Malang selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Kota Mojokerto selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan

kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Kota Pasuruan selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Kota Probolinggo selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Kota Surabaya pada periode 2007 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Sedang dengan pola hubungan Partisipatif, sedangkan pada periode 2008-2010 menunjukkan kemampuan daerah yang Rendah dengan pola Hubungan Konsultatif, dan pada periode 2011 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Tinggi dengan pola hubungan Delegatif. Kota Batu selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif.

Berikut disajikan grafik kemandirian keuangan daerah pada Gambar 2.

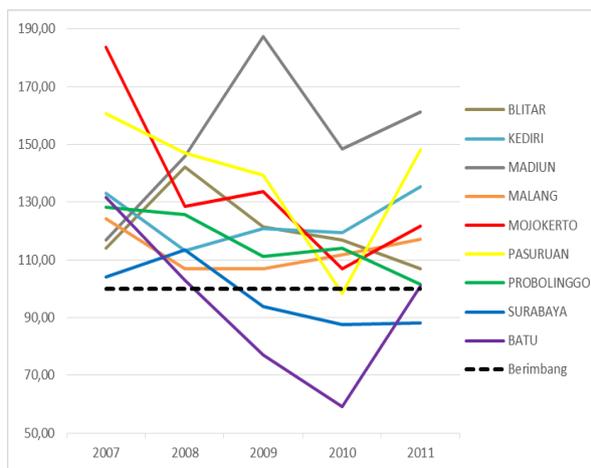


Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diketahui bahwa Kota Blitar selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota Kediri selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota Madiun selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota Malang selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota Mojokerto selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota Pasuruan selama tiga tahun berturut-turut (2007-2009) selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif tetapi pada periode 2010 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang mendekati Efektif Berimbang kemudian pada periode 2011 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota Probolinggo selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif. Kota Surabaya pada periode 2007-2008 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif, sedangkan pada periode 2009-2011 menunjukkan kemampuan daerah yang mendekati Efektif Berimbang. Kota Batu selama periode 2007-2008 menunjukkan

kemampuan keuangan daerah yang Efektif sedangkan selama periode 2009-2010 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Tidak Efektif kemudian pada tahun 2011 menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang Efektif Berimbang.

Berikut disajikan grafik kemandirian keuangan daerah pada Gambar 3.

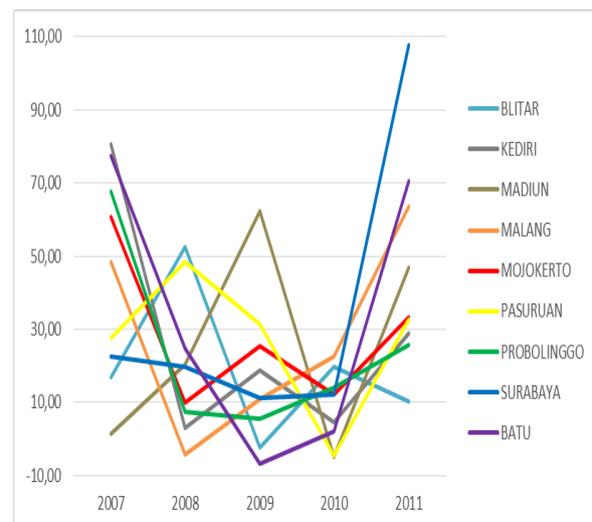


Analisis Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis Rasio Pertumbuhan PAD diketahui pada periode 2007 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah sebesar 44,83%, pemerintah kota yang memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas rata-rata pada periode 2007 adalah Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Batu. Pada periode 2008 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah sebesar 20,22%, pemerintah kota yang memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas rata-rata pada periode 2008 adalah Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu.

Pada periode 2009 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah sebesar 17,39%, pemerintah kota yang memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas rata-rata pada periode 2009 adalah Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan. Pada periode 2010 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah sebesar 8,67%, pemerintah kota yang memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas rata-rata pada periode 2010 adalah Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya. Pada periode 2011 rata-rata nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah sebesar 46,60%, pemerintah kota yang memiliki nilai rasio pertumbuhan keuangan daerah di atas rata-rata pada periode 2011 adalah Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Batu.

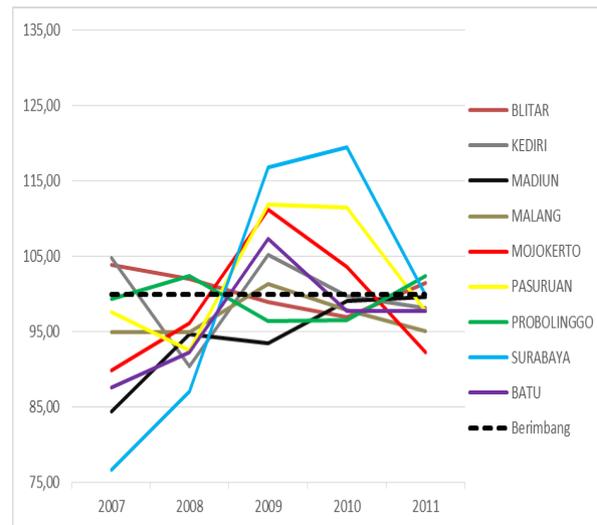
Berikut disajikan grafik pertumbuhan pendapatan asli daerah pada Gambar 4.



Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa Kota Blitar memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 100,67% yang berarti Efisien Berimbang. Kota Kediri memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 99,66% yang berarti mendekati Efisien Berimbang. Kota Madiun memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 94,27% yang berarti mendekati Efisien Berimbang. Kota Malang memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 96,82% yang berarti mendekati Efisien Berimbang. Kota Mojokerto memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 98,59% yang berarti mendekati Efisien Berimbang. Kota Pasuruan memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 102,23% yang berarti Tidak Efisien. Kota Probolinggo memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 99,44% yang berarti mendekati Efisien Berimbang. Kota Surabaya memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 100,01% yang berarti Efisien Berimbang. Kota Batu memiliki nilai rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 96,51% yang berarti mendekati Efisien Berimbang.

Berikut disajikan grafik pertumbuhan pendapatan asli daerah pada Gambar 4.



PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pada Rasio Kemandirian sebagian besar Pemerintah Kota di Jawa Timur masih memiliki pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan kecuali Kota Surabaya yang mampu memiliki pola hubungan Partisipatif dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya yang juga sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur lebih mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dengan PAD yang didapat. Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur juga merupakan pusat perekonomian bagi wilayah timur Indonesia sehingga Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, di antaranya galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT PAL yang berlokasi di Kota Surabaya, hal ini menjadikan Kota Surabaya lebih memiliki sektor yang kompleks sehingga pendapatan daerahnya terdorong oleh

berbagai sektor tersebut. Berdasarkan rasio efektivitas diketahui bahwa hampir seluruh Pemerintah Kota memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang Efektif sedangkan Kota Surabaya dan Kota Batu dalam pengelolaan keuangan daerahnya Tidak Efektif.

Berdasarkan rasio pertumbuhan diketahui bahwa seluruh Pemerintah Kota di Jawa Timur mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pemerintah Kota di Jawa Timur menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan, maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan. Berdasarkan rasio efisiensi diketahui bahwa seluruh Pemerintah Kota yang ada di Jawa Timur belum mampu untuk Efisien. Seluruh Kota di Jawa Timur hanya mampu Efisien Berimbang dalam pengelolaan keuangan daerahnya sehingga masih perlu banyak perbaikan guna terpenuhinya prinsip *value for money*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, pola hubungan kemandirian daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 22,72%. Terkecuali pada Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki rasio rata-rata 56,56% (Pola Hubungan Partisipatif), bahkan pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya mencapai nilai rasio 100,75% (Pola Hubungan Delegatif). Berdasarkan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota di Jawa Timur dapat dikatakan Efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan antara realisasi PAD dibandingkan dengan target PAD yang hampir seluruh kota mencapai nilai rasio diatas 100% yang berarti masuk dalam kategori efektif. Adapun kota yang dalam lima tahun terakhir sulit untuk mendapatkan nilai rasio 100% adalah Kota Surabaya yang rata-rata rasionya hanya 97,41% dan Kota Batu yang rata-rata rasionya hanya 94,32%. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2011 terlihat peningkatan pertumbuhan dari semua kota yang ada, peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di mana daerah

sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kenaikan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial. Berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, selama periode tahun anggaran 2009-2011, tingkat efisiensi keuangan daerah pada sebagian Pemerintah Kota di Jawa Timur memiliki kecenderungan Efisien Berimbang, dengan tingkat efisiensi di kisaran 100 %. Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.

Saran

Pemerintah Kota di Jawa Timur harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mendorong kemandirian daerah agar semakin tinggi. Melakukan

penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sumber-sumber PAD tersebut, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan pembangunan pada sektor utama yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat. Penyelenggaraan proses lelang terbuka terhadap proyek pemerintah sehingga dalam realisasinya dapat menggunakan biaya seminimal mungkin guna memenuhi kebutuhan pemerintahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hafiz, 2008, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)*, Alfabeta, Bandung
- Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Adelia Shabrina Prameka, 2013, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Arikunto S., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Ayu Febriyanti, 2013, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Dian Aprianti, 2012, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Hasil Pemekaran Di Sumatera Selatan (Studi Kasus Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009-2001)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Hasbi Adiyatullah, 2011, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- HAW, Wijaya, 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto, 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*, GaneÇ Swara, Vol. 4, No.3, Desember 2010.
- I Ketut Rahyuda, 2004, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Ihyaul Ulum, 2005, *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Imam Bastari, 2004, *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Indra Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- Mariyam Kusumajadi, 2011, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Oesi Agustina, 2013, *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*, *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.